



**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**T E N T A N G  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tanggal 9 Maret 2015 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa .
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
 dan  
 BUPATI MAMASA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 674.328.234.506,00 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 167.992.417.792,00 sehingga menjadi Rp. 842.320.652.298,00 dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula		Rp. 674,328,234,506.00	
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. 167,992,417,792.00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 842,320,652,298.00
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 657,009,009,079.00	
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. 211,530,301,687.00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp. 868,539,310,766.00</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan			<u>Rp. (26,218,658,468.00)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula		Rp. 22,612,623,000.00	
2. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. 4,346,035,468.00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			<u>Rp. 26,958,658,468.00</u>
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp. 39,931,848,427.00	
2. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp. (39,191,848,427.00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp. 740,000,000.00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			<u>Rp. 26,218,658,468.00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			<u><u>Rp. -</u></u>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp.	15,056,185,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>1,906,105,040.00</b>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 16,962,290,040.00
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp.	594,151,452,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>114,480,482,000.00</b>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 708,631,934,000.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	65,120,597,506.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>51,605,830,752.00</b>	
Jumlah Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 116,726,428,258.00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	2,830,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>703,500,000.00</b>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 3,533,500,000.00
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	2,216,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>-1,308,196,536.00</b>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 907,803,464.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
a. Semula	Rp.	2,500,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>429,669,645.00</b>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2,929,669,645.00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	7,510,185,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>2,081,131,931.00</b>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 9,591,316,931.00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	20,008,342,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(717,438,000)</b>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 19,290,904,000.00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	468,897,770,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 468,897,770,000.00
c. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	105,245,340,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>115,197,920,000.00</b>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 220,443,260,000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenbis pendapatan :

Dana Hibah			
a.	Semula	Rp.	1,250,000,000.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>
	Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.	1,250,000,000.00
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
a.	Semula	Rp.	3,500,000,000.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>4,877,617,258.00</b>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	8,377,617,258.00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
a.	Semula	Rp.	48,300,647,000.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(80,500,000)</b>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	48,220,147,000.00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
a.	Semula	Rp.	0.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>13,310,034,000.00</b>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	13,310,034,000.00
e. Pendapatan Lainnya			
a.	Semula	Rp.	0.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>323,204,000.00</b>
	Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp.	323,204,000.00
f. Dana Desa			
a.	Semula	Rp.	12,069,950,506.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>33,175,475,494.00</b>
	Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp.	45,245,426,000.00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
a.	Semula	Rp.	338,911,328,210.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>38,253,897,472.00</b>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	377,165,225,682.00
b. Belanja Langsung			
a.	Semula	Rp.	318,097,680,869.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>173,276,404,215.00</b>
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	491,374,085,084.00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai			
a.	Semula	Rp.	301,462,528,210.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>4,022,234,472.00</b>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	305,484,762,682.00
b. Belanja Bunga			
a.	Semula	Rp.	0.00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0.00

c. Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 0.00
d. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	9,580,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>8,000,000.00</b>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 9,588,000,000.00
e. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	7,047,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>97,000,000.00</b>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 7,144,000,000.00
f. Belanja Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 0.00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
a. Semula	Rp.	17,821,800,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>36,792,426,000.00</b>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuanganl setelah Perubahan			Rp. 54,614,226,000.00
h. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp.	3,000,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(2,665,963,000.00)</b>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 334,037,000.00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis :			
a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	18,311,833,724.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>56,483,776.00</b>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 18,368,317,500.00
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	132,741,972,393.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>23,955,729,962.00</b>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 156,697,702,355.00
c. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	167,043,874,752.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>149,264,190,477.00</b>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 316,308,065,229.00
<b>Pasal 4</b>			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah Rp. 26.958.658.468,-			
a. Semula	Rp.	22,612,623,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>4,346,035,468.00</b>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 26,958,658,468.00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 740.000.000,-			
a. Semula	Rp.	39,931,848,427.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(39,191,848,427)</b>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 740,000,000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 26.958.658.468,-			
a. Semula	Rp.	22,612,623,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>4,346,035,468.00</b>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 26,958,658,468.00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0.00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0.00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0.00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0.00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,-			
a. Semula	Rp.	1,000,000,000.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(500,000,000.00)</b>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 500,000,000.00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.240.000.000,-			
a. Semula	Rp.	38,931,848,472.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>(38,691,848,472)</b>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 240,000,000.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
a. Semula	Rp.	0.00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<b>0.00</b>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2015

**BUPATI MAMASA,**

ttd

**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

**Drs. BENYAMIN YD, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
N I P : 19641010 198303 1 005